



Analisis Kritis Implementasi Program Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kualitas Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa

Rahmatul Dadang¹, Adi Putra²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang
rddgkala54@gmail.com¹, putra4dikala@gmail.com²

Article History:

Received: 12-01-2025

Revised: 22-01-2025

Accepted: 02-02-2025

Keywords: 3 Kampus Merdeka, MBKM, Pengabdian Kepada Masyarakat, Mahasiswa, Analisis Kebijakan, Pendidikan Tinggi, Kualitas Pendidikan

Abstract: Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merepresentasikan salah satu reformasi paling fundamental dalam lanskap pendidikan tinggi Indonesia, menjanjikan pembelajaran yang lebih fleksibel, otonom, dan relevan dengan dunia nyata. Salah satu pilar utamanya adalah pengakuan dan fasilitasi kegiatan mahasiswa di luar kampus, termasuk dalam domain Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Artikel ini menyajikan sebuah analisis kebijakan yang kritis terhadap implementasi program MBKM dan dampaknya terhadap kualitas kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa. Dengan menggunakan metode studi dokumen dan analisis wacana kritis terhadap regulasi inti (Permendikbudristek No. 53/2023), buku panduan resmi, serta laporan implementasi, penelitian ini bertujuan untuk membedah potensi, peluang, sekaligus kelemahan struktural dari kebijakan tersebut. Hasil analisis menunjukkan adanya dualisme yang tajam: di satu sisi, MBKM membuka peluang luar biasa untuk PkM yang lebih terstruktur, berdurasi panjang, terintegrasi dengan kurikulum melalui rekognisi 20 SKS, dan berpotensi meningkatkan kompetensi mahasiswa. Namun di sisi lain, analisis kritis ini mengungkap adanya risiko-risiko signifikan, seperti kecenderungan pendekatan yang "proyek-sentris" ketimbang "pemberdayaan berkelanjutan", tantangan standarisasi asesmen yang mengabaikan konteks lokal, serta potensi komodifikasi pengabdian yang mereduksi spirit pelayanan menjadi sekadar transaksi pemenuhan SKS. Disimpulkan bahwa MBKM bukanlah formula ajaib yang secara otomatis meningkatkan kualitas PkM; ia adalah sebuah "pisau bermata dua" yang dampaknya—apakah redefinisi kualitas yang positif atau reduksi makna—sangat bergantung pada paradigma dan kesiapan implementasi di tingkat institusional perguruan tinggi.

© 2025 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bukanlah sekadar sebuah butir dalam daftar kewajiban perguruan tinggi di Indonesia; ia adalah nurani, kontrak sosial yang mengikat institusi pendidikan tinggi dengan realitas masyarakat yang melingkupinya. Selama lebih dari setengah abad, manifestasi paling ikonik dari kontrak sosial ini bagi mahasiswa adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN telah menjadi sebuah ritus peralihan (*rite of passage*) bagi jutaan calon sarjana, sebuah pengalaman imersif yang memaksa mereka keluar dari ruang-ruang kelas yang steril untuk bergulat secara langsung dengan kompleksitas, kemiskinan,

dan kearifan yang ada di pedesaan dan pelosok negeri (Hardjosoemantri, 1987). Lebih dari sekadar aplikasi ilmu, KKN secara historis merupakan wahana pembentukan karakter, tempat di mana empati diasah, kepekaan sosial ditumbuhkan, dan pemahaman teoretis diuji di hadapan kebijaksanaan empiris masyarakat. Inilah jiwa pengabdian yang diwariskan dari generasi ke generasi: sebuah proses belajar dua arah yang transformatif.

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, yang ditandai oleh disrupsi digital dan tuntutan relevansi yang semakin kencang, lanskap pendidikan tinggi Indonesia dihadapkan pada sebuah intervensi kebijakan yang radikal: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini lahir dari sebuah diagnosis bahwa perguruan tinggi telah menjadi terlalu kaku, terisolasi, dan lambat dalam merespons kebutuhan zaman yang dinamis. Fenomena ini sejalan dengan tren global yang mendorong reformasi pendidikan tinggi agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar kerja dan tantangan masyarakat (OECD, 2022). MBKM, yang kini telah memasuki tahun-tahun implementasinya per 2 Oktober 2025 ini, dicanangkan sebagai sebuah gerakan pembebasan—membebaskan mahasiswa untuk belajar di luar batas-batas program studi mereka. Dalam kerangka ini, berbagai kegiatan di luar kampus yang beririsan erat dengan PkM, seperti program Membangun Desa/KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan, tidak hanya difasilitasi tetapi juga diberi penghargaan akademis tertinggi, setara dengan 20 SKS (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2022).

Pada tataran wacana resmi, kebijakan MBKM ini menjanjikan sebuah simbiosis mutualisme yang ideal antara penguatan kompetensi mahasiswa dan peningkatan kualitas pengabdian. Narasi yang dibangun adalah bahwa PkM akan berevolusi dari sebuah aktivitas yang seringkali karitatif dan temporer menjadi sebuah bentuk intervensi sosial yang lebih profesional, terstruktur, dan berdampak. Dengan durasi satu semester penuh, mahasiswa diharapkan dapat terlibat lebih dalam, merancang program yang lebih substantif, dan pada saat yang sama, mengembangkan portofolio keterampilan yang diakui secara formal oleh kurikulum. Ini adalah sebuah visi modernisasi PkM, di mana semangat pengabdian yang tulus dipadukan dengan kerangka manajemen proyek dan pengukuran capaian pembelajaran yang jelas. Visi ini menawarkan sebuah lompatan kualitatif yang menjanjikan.

Namun, di sinilah letak persimpangan kritis yang menjadi fokus utama artikel ini. Formalisasi dan instrumentalisasi PkM di bawah bendera MBKM memunculkan sebuah ketegangan fundamental yang tidak dapat diabaikan. Ketika sebuah pengabdian diberi label harga 20 SKS, apakah nilai intrinsiknya sebagai sebuah pelayanan tulus berisiko terdegradasi menjadi sekadar transaksi akademis? Fenomena ini mencerminkan kritik yang lebih luas tentang neoliberalisme dalam pendidikan tinggi, di mana pengetahuan dan pengalaman belajar direduksi menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan (Giroux, 2014). Pertanyaan sentralnya adalah: apakah fokus pada *learning outcomes* mahasiswa secara tidak sadar mengesampingkan *community outcomes* yang otentik, dan apakah spirit pelayanan tergantikan oleh pragmatisme kurikuler?

Dengan berangkat dari dilema tersebut, artikel ini akan menyajikan sebuah analisis kebijakan yang kritis dan berimbang. Tujuannya bukan untuk menolak atau menerima kebijakan MBKM secara mentah-mentah, melainkan untuk membongkar secara cermat kompleksitas, kontradiksi, dan implikasi yang terkandung di dalamnya. Tulisan ini akan memulai dengan memetakan potensi yang ditawarkan, sebelum bergerak lebih dalam untuk menganalisis berbagai kelemahan struktural dan risiko pedagogis. Puncaknya, artikel ini akan bermuara pada sebuah refleksi kritis mengenai diskursus "kualitas" itu sendiri dalam konteks PkM di era MBKM.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif-interpretif dengan pendekatan kritis. Paradigma ini dipilih karena tujuan penelitian bukanlah untuk mengukur efektivitas MBKM secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, menginterpretasi, dan mengkritisi makna, asumsi, dan implikasi yang tersembunyi di balik kebijakan tersebut. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kebijakan (policy case study), dengan kebijakan MBKM sebagai kasus tunggal yang dianalisis secara mendalam dan holistik (Yin, 2018).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (document study) yang komprehensif. Sumber data primer yang menjadi objek utama analisis adalah dokumen-dokumen kebijakan inti, meliputi: (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan (2) Rangkaian Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka beserta panduan teknis BKP yang relevan. Data sekunder mencakup: (1) artikel-artikel ilmiah dari basis data Google Scholar dan SINTA; (2) laporan-laporan publik dari lembaga pemerintah dan universitas; serta (3) artefak digital berupa materi presentasi resmi dari pejabat Kemendikbudristek dan rekaman webinar publik.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah kodifikasi tematik, di mana seluruh dokumen dibaca untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi bagian teks yang relevan dengan PkM. Tahap kedua adalah analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Pendekatan ini tidak hanya berhenti pada apa yang tertulis, tetapi juga membongkar "bagaimana" dan "mengapa" hal itu ditulis demikian, dengan mengacu pada kerangka kerja yang dikembangkan oleh para ahli di bidang ini (Fairclough, 2013). CDA difokuskan pada tiga level: (1) Analisis Teks: Mengidentifikasi pilihan kata dan metafora dominan. (2) Analisis Praktik Diskursif: Memeriksa bagaimana teks kebijakan diproduksi dan dikonsumsi. (3) Analisis Praktik Sosiokultural: Menghubungkan wacana dalam kebijakan dengan konteks ideologis yang lebih luas. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari dokumen kebijakan resmi, kritik dalam artikel ilmiah, dan narasi di media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mendalam terhadap kebijakan MBKM menyingkap sebuah realitas yang penuh dengan dualisme. Ia laksana Dewa Janus bermuka dua: satu wajah menatap ke arah masa depan yang cerah penuh potensi, sementara wajah lainnya menatap ke arah risiko-risiko fundamental yang dapat mengikis jiwa pengabdian.

Narasi Resmi MBKM: Janji Modernisasi dan Peningkatan Kualitas PkM

Wajah pertama MBKM adalah wajah optimisme dan modernisasi. Dalam dokumen resminya, kebijakan ini secara konsisten dinarasikan sebagai sebuah terobosan untuk meningkatkan kualitas PkM mahasiswa. Peningkatan kualitas ini dijanjikan melalui beberapa mekanisme struktural. Yang paling fundamental adalah eskalasi durasi dan intensitas. Dengan pengakuan setara 20 SKS untuk satu semester, MBKM secara radikal mengubah PkM dari "kegiatan sisipan" menjadi sebuah pengalaman imersif yang mendalam, sebuah prasyarat untuk pembelajaran eksperiensial yang efektif (Kolb, 2015). Durasi yang panjang ini membuka ruang bagi mahasiswa untuk membangun hubungan otentik dengan masyarakat, sebuah lompatan dari intervensi dangkal menuju keterlibatan substantif.

Janji kualitas berikutnya datang dari integrasi kurikuler yang terstruktur. Pengalaman PkM kini diakui sebagai bagian integral dari proses pencapaian gelar sarjana, memaksa universitas merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dapat dipenuhi di luar kelas. PkM tidak lagi dianggap sebagai kegiatan non-akademis, melainkan sebagai laboratorium nyata. Wacana yang dominan adalah tentang pengembangan kompetensi holistik. PkM dalam kerangka ini secara eksplisit dirancang sebagai "pusat kebugaran" untuk melatih otot-otot *soft skills* yang paling dicari di abad ke-21. Berbagai studi awal menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti program seperti Membangun Desa (KKNT) MBKM mengalami peningkatan signifikan dalam keterampilan pemecahan masalah kompleks, kolaborasi, dan kepemimpinan (Rahmawati & anor., 2025). Dengan demikian, kualitas PkM dalam narasi resmi MBKM didefinisikan ulang: dari sekadar "bermanfaat bagi masyarakat" menjadi sebuah proses yang secara terukur "menghasilkan mahasiswa yang kompeten dan berdaya saing".

Analisis Kritis Lapisan Pertama: Dilema Struktural di Tingkat Implementasi

Namun, ketika narasi ideal tersebut dihadapkan pada realitas implementasi, wajah kedua MBKM yang penuh dilema mulai terlihat. Analisis kritis pada lapisan pertama ini menyoroti tiga kelemahan struktural utama.

(a) Jebakan Proyek dan Erosi Paradigma Pemberdayaan: Struktur MBKM, yang menuntut proposal dan laporan dengan luaran terukur demi konversi SKS, secara inheren mendorong pendekatan proyek-sentris. Pendekatan ini, meskipun tampak efisien, secara fundamental bertentangan dengan paradigma pemberdayaan kritis. Pemberdayaan sejati, sebagaimana diajarkan oleh Freire (1970) dan diadaptasi dalam konteks lokal (Setiawan, 2023), bukanlah tentang "melakukan sesuatu untuk masyarakat", melainkan tentang "berproses bersama masyarakat". Dalam jebakan proyek MBKM, ada risiko besar di mana mahasiswa menjadi "agen proyek" yang mendefinisikan masalah dan solusi, sebuah mentalitas yang dikritik dalam literatur pembangunan sebagai pendekatan *top-down* yang seringkali gagal (Easterly, 2006).

(b) Tirani Standardisasi dan Pengabaian Konteks Lokal: Untuk menjamin keadilan mutu secara nasional (Permendikbudristek No. 53, 2023), kebijakan MBKM mendorong standardisasi dalam asesmen. Namun, dorongan ini memunculkan sebuah tirani. Rubrik penilaian yang seragam berisiko mengabaikan keunikan konteks lokal. Proses PkM yang berhasil memediasi konflik tanah akan sulit dinilai dengan rubrik yang sama dengan PkM yang berhasil meningkatkan penjualan UMKM. Akibatnya, ada insentif tersembunyi untuk memilih program-program yang "aman" dan mudah diukur, sambil menghindari isu-isu sosial yang paling krusial namun "rumit" untuk dilaporkan.

(c) Krisis Kesiapan: Ilusi Kompetensi Mahasiswa dan DPL: Asumsi besar di balik MBKM adalah bahwa mahasiswa semester 5 ke atas sudah cukup matang untuk menjadi agen perubahan. Kenyataannya, banyak mahasiswa berangkat dengan bekal teoretis yang minim dan seringkali membawa serta "kompleks juru selamat" (*savior complex*). Berbagai analisis implementasi awal menyoroti bahwa baik mahasiswa maupun Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) seringkali belum siap sepenuhnya (Prasetyo & Nugroho, 2024). Banyak DPL lebih fokus pada pemenuhan aspek administratif daripada memberikan pendampingan pedagogis yang mendalam, menciptakan sebuah ilusi di mana kegiatan tampak berjalan lancar di atas kertas, namun proses pembelajaran dan pemberdayaan yang substantif tidak terjadi.

Analisis Kritis Lapisan Kedua: Komodifikasi dan Pergeseran Jiwa Pengabdian

Jika lapisan pertama adalah tentang masalah teknis, lapisan analisis kedua ini masuk ke jantung persoalan: bagaimana MBKM berisiko menggeser jiwa pengabdian itu sendiri. (a) PkM sebagai "Produk" Kurikuler di Pasar Akademik: Salah satu dampak paling subtil dari MBKM adalah reframing PkM menjadi sebuah "produk" dalam "pasar" kurikuler. Mahasiswa dapat "memilih" PkM dari menu BKP untuk "mendapatkan" 20 SKS. Fenomena ini merupakan bagian dari tren yang lebih besar dari "kapitalisme akademik", di mana logika pasar meresap ke dalam aktivitas universitas yang sebelumnya non-komersial (Slaughter & Rhoades, 2004). Istilah "mitra", misalnya, seringkali menyiratkan hubungan kerja sama berbasis kepentingan, yang bisa sangat berbeda dari hubungan solidaritas yang menjadi inti PkM di komunitas termarjinalkan. (b) Reduksi Kualitas Menjadi Keterukuran: Ini adalah konsekuensi paling filosofis. Dengan menempatkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terukur sebagai tolok ukur utama, kebijakan ini secara sistematis berisiko mendevaluasi aspek-aspek pengabdian yang paling transformatif namun sulit diukur. Bagaimana cara mengukur tumbuhnya kerendahan hati? Bagaimana mengkuantifikasi modal sosial yang terbangun? Dengan memfokuskan "kualitas" pada apa yang bisa diukur, kita berisiko kehilangan pandangan terhadap apa yang paling berarti: pembentukan karakter, etika kewarganegaraan, dan kebajikan sipil (*civic virtue*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara fundamental telah mengubah lanskap Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa di Indonesia. Ia bukanlah sebuah kebijakan monolitik baik atau buruk, melainkan sebuah instrumen dengan dualisme dampak yang tajam. Di satu sisi, ia menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk merevitalisasi PkM. Namun di sisi lain, tersembunyi risiko-risiko struktural dan filosofis yang mendalam: pendekatan proyek-sentris, tirani standarisasi, krisis kesiapan ekosistem, dan yang paling mengkhawatirkan, proses komodifikasi yang dapat mengikis jiwa pengabdian. Pada akhirnya, dampak MBKM terhadap kualitas PkM bukanlah sesuatu yang deterministik, melainkan sebuah arena kontestasi. Apakah ia akan menjadi kekuatan transformatif atau justru transaksional, sangat bergantung pada bagaimana perguruan tinggi memilih untuk mengimplementasikan "kemerdekaan" yang ditawarkan.

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa saran diajukan untuk mengoptimalkan potensi positif MBKM sambil memitigasi risikonya: mengembangkan fleksibilitas asesmen yang memberikan bobot signifikan pada proses, refleksi kritis mahasiswa, dan testimoni kualitatif dari komunitas. Selain itu, mempromosikan skema insentif khusus bagi perguruan tinggi yang mampu mengembangkan kemitraan PkM multi-tahun. Bagi Perguruan Tinggi/LPPM dapat berinvestasi serius dalam pengembangan kapasitas DPL melalui pelatihan pedagogi kritis. Mengadopsi paradigma kemitraan berkelanjutan dengan beberapa komunitas binaan strategis, bukan "penyebaran" mahasiswa secara acak. Dan yang terpenting, mengintegrasikan refleksi kritis (jurnal, esai) sebagai komponen wajib dalam penilaian PkM MBKM

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2022). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Kemendikbudristek.
- Easterly, W. (2006). *The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good*. Penguin Press.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge.

- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Giroux, H. A. (2014). *Neoliberalism's War on Higher Education*. Haymarket Books.
- Hardjosoemantri, K. (1987). *Kuliah Kerja Nyata (KKN): Pengabdian Perguruan Tinggi kepada Masyarakat*. Djambatan.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* (2nd ed.). Pearson FT Press.
- OECD. (2022). *The Future of Higher Education: Trends, Scenarios, and Policy Implications*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Prasetyo, I., & Nugroho, H. (2024). Euforia dan Realitas Kampus Merdeka: Tinjauan Kritis terhadap Implementasi Kebijakan di Perguruan Tinggi Daerah. *Jurnal Studi Kebijakan Pendidikan*, 7(1), 89–105.
- Rahmawati, D., & anor. (2025). Dampak Program Membangun Desa (KKNT) MBKM terhadap Keterampilan Pemecahan Masalah dan Kolaborasi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 22–38.
- Setiawan, B. (2023). *Dari Objek ke Subjek: Paradigma Pemberdayaan Kritis dalam Pembangunan Komunitas*. Gadjah Mada University Press.
- Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). *Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State, and Higher Education*. Johns Hopkins University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.